



Kader Parpol Diduga Terlibat Kasus UPS

SEJUMLAH parpol di Jakarta hingga kini belum bersikap terkait kader yang duduk di DPRD DKI Jakarta dan terindikasi terlibat dalam kasus Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD DKI 2014.

Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Ongen Sangaji mengakui, salah satu kadernya sedang dimintai keterangan oleh kepolisian terkait kasus UPS. "Karena statusnya baru sebagai saksi, kenapa harus diberi sanksi. Sebagai ketua partai, saya hormati proses hukum berjalan. Kalau memang ada kader hanura terbukti menjadi tersangka dalam kasus ini. Saya sebagai pimpinan partai tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi," ujar dia.

Seperti diketahui, sejak kasus UPS mencuat, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sudah dimintai keterangan. Di antaranya Fahmi Zulfikar, anggota dewan dari Fraksi Hanura. Fahmi diperiksa kepolisian dengan status saksi.

Tak hanya dari Partai Hanura, kader parpol lainnya juga tengah menjalani pemeriksaan serupa. Seperti indikasi keterlibatan kader Gerindra. "Saya pastikan tidak ada kader Gerindra di DPRD Jakarta yang terlibat kasus UPS. Kalau ada yang menyebut nama Rina, itu hanya kebetulan orang tuanya Alex Usman yang disebut-sebut calon kuat jadi tersangka dalam kasus ini," ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M Taufik.

Di lain pihak, kepolisian pernah menyebut oknum anggota DPRD DKI Jakarta berpotensi menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) APBD DKI 2014. Sebab terdapat kader parpol yang dianggap sebagai penggagas pengadaan UPS di dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.

Namun tidak hanya anggota dewan, oknum pejabat di Pemprov DKI Jakarta juga berkemungkinan tersangkut kasus ini. "Potential suspect (berpotensi tersangka) adalah yang berkaitan dengan penggagas (UPS) tadi eksekutif, legislatif dan distributor," ucap

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto di Mabes Polri, beberapa waktu lalu.

Terkait jadwal pemeriksaan anggota DPRD DKI Jakarta, Rikwanto menuturkan penyidik masih menelaah berkas pemeriksaan saksi yang telah diperiksa Polda Metro Jaya dan selanjutnya dilakukan gelar perkara. "Langkah selanjutnya memanggil dan menetapkan siapa calon tersangka," papar dia.

Rikwanto juga menegaskan, penyidik Polri akan mengusut pihak yang menerima aliran dana dari hasil penggelembungan anggaran pengadaan UPS itu. "Kita akan telusuri siapa saja yang menerima," lanjut dia.

Sebelumnya penanganan kasus pengadaan UPS dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Pengadaan UPS bagi 49 sekolah di wilayah DKI Jakarta itu diduga terjadi penggelembungan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar per unit. (pes)